

PEMBERDAYAAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PEKON KILUAN NEGRI, KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG

Agustina Multi Purnomo¹

¹Mahasiswa Program S3 Sosiologi Universitas Indonesia, Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor

Abstrak

Konsep ekowisata menekankan pada pengelolaan wisata berbasis masyarakat lokal dengan salah satu tujuan utamanya adalah pemberdayaan sosial masyarakat lokal. Pemberdayaan sosial mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Scheyvens (1999) meliputi partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata, alokasi hasil pengembangan ekowisata untuk masyarakat lokal dan tidak adanya indikasi kegagalan pengembangan ekowisata. Berdasarkan kerangka ini, penelitian di Pekon Kiluan Negri dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan dan *focus group discussion*. Penelitian dilakukan selama satu bulan pada masa sepi dan ramai kunjungan. Masyarakat pekon Kiluan Negri diambil sebagai batasan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan secara umum telah ada partisipasi masyarakat, ada alokasi hasil pengembangan ekowisata untuk masyarakat dan penilaian negatif dari masyarakat untuk unsur kegagalan. Partisipasi belum melibatkan perempuan, anak dan unsur masyarakat yang tidak terlibat dalam LSM, bukan aparat desa dan tokoh desa serta bukan penyedia layanan wisata. Keterbukaan alokasi hasil pengembangan ekowisata juga masih ditanyakan peruntukannya oleh masyarakat pada kelompok ini. Ini menunjukkan masih diperlukannya pelibatan masyarakat secara menyeluruh dan keterbukaan pengelolaan dana hasil pengembangan ekowisata.

Kata Kunci: Pemberdayaan sosial, ekowisata, Teluk Kiluan, Lampung

SOCIAL EMPOWERMENT ON ECOTOURISM DEVELOPMENT IN KILUAN NEGRI VILLAGE, TENGAMUS REGENCY, PROVINCE OF LAMPUNG

Abstract

The concept of ecotourism emphasizing on local community-based tourism management with one of its primary attraction is a social empowerment of local communities. Social empowerment refers to the approach taken by Scheyvens (1999) that includes the participation of local communities in the management of ecotourism, the allocation of profits gained in the ecotourism development for the local community and no indication of failure in the ecotourism development. Based on the framework, the research at the Negri Kiluan Village was conducted with qualitative methods and data collection techniques (interview), observation and focus group discussion. The study was conducted for one month during the low and high season of tourism. Residents of Kiluan Negri Village was selected to be analysed for the study. The results showed that in general, there were community participation, allocation of profits from ecotourism development for the community and the community's negative view or opinion of failing. Local community did not involve women, children, any NGOs, village officials and leaders, and travel service providers. The allocation of profit transparency of the ecotourism development was still questioned by the people in this group. It showed the need for the involvement of all the village residents and the transparency in the management of ecotourism development.

Keywords: social empowerment, ecotourism, Teluk Kiluan, Lampung

Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Isu yang kemudian menjadi kesepakatan dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil di mana paradigma pembangunan berkelanjutan menjadi agenda politik pembangunan di dunia. Pelestarian sumberdaya alam (SDA) merupakan salah satu isu sentral pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya perlindungan SDA pemerintah Indonesia diantaranya menerapkan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Di bidang Pariwisata, respon terhadap konsep pariwisata yang ramah lingkungan ditanggapi dengan lahirnya konsep ekowisata. Peraturan pemerintah yang menjadi pedoman, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1998 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, dan Taman Wisata Alam, serta Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Jenis PNBP yang Berlaku Pada Dephutbun, Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/KPTS-II/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian & Pencabutan Izin Pengusaha Pariwisata Alam.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang ekowisata di Indonesia, menunjukkan penekanan pada kelayakan lokasi sebagai penyelenggara ekowisata. Penelitian Karsudi dkk. (2010) menekankan penelitian pada kemungkinan pengembangan ekowisata di Kepulauan Yapen Provinsi Papua terutama feasibilitas lokasi sebagai penyedia layanan wisata, peran penduduk dan konservasi tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian serupa dilakukan oleh Asso (2010) yang mengkaji potensi pengembangan Lembah Baliem sebagai destinasi ekowisata. Meskipun terdapat kata berkelanjutan pada judul publikasi, namun penekanan penelitian lebih pada kemungkinan pengembangan ekowisata

dilihat dari keunggulan lokasi, ketersediaan sarana dan upaya pengembangan yang perlu dilakukan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kurnianto (2008) tentang kemungkinan pengembangan ekowisata di Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal.

Penelitian tentang ekowisata di Indonesia dengan fokus pada pelestarian lingkungan dilakukan oleh Atmoko (2009). Ia menemukan kemungkinan keselarasan antara pengembangan ekowisata dengan pelestarian bekantan di Kuala Semboja, Kalimantan Timur. Penelitian dengan sudut pandang keanekaragaman hayati di wilayah ekowisata dilakukan oleh Eprilurahma (2009) tentang studi keanekaragaman amphibi dan reptil di kawasan ekowisata.

Penelitian yang menekankan pada pengelolaan ekowisata dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam dilakukan oleh Muherin (2008), penelitian ini menemukan pengembangan ekowisata di wilayah hutan mangrove dapat menjaga keseimbangan antara kelestarian hutan mangrove dengan pendapatan penduduk. Penelitian Purnomo (2013) juga menekankan pada kemungkinan pengembangan ekowisata dengan penekanan selain pada kelayakan lokasi juga pada peran pemerintah dan masyarakat. Porsi penekanan pada masyarakat tidak sebanyak pada peran daya dukung alam sebagai potensi wisata. Studi tentang peran masyarakat dalam pengembangan ekowisata dilakukan oleh Aziz (2008) yang menemukan masyarakat kurang berperan dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Pekalongan khususnya di lokasi studi Obyek Wisata Linggo Asri. Salah satu penelitian yang menekankan pada komunitas lokal sebagai unsur utama dalam ekowisata dilakukan oleh Imran (2012). Penelitian ini menekankan pada komunitas tidak hanya sebagai pengelola namun sebagai destinasi utama ekowisata.

Penekanan pada masyarakat lokal terutama untuk menghindarkan kendali pengembangan ekowisata dari luar dan memaksimalkan

keuntungan untuk mereka (Liu, 1994; Ceballos-Lascurain, 1996, dalam Kontogeorgopoulos, 2005). Konsep yang menekankan pada peran komunitas atau masyarakat lokal dalam mengelola ekowisata dikenal dengan konsep CBEM (*Community Based Ecotourism Management*). Penelitian Faucat (2002) tentang CBEM di Mexico menemukan konsep CBEM mendukung keberlanjutan lingkungan. di sisi lain, penelitian Hijriati dan Mardiana (2014) menemukan pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kerjasama masyarakat.

Penelitian Scheyvens (1999), menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengelola ekowisata tidak hanya mencakup keterlibatan (partisipasi), namun masyarakat sendiri yang menjadi pengembang ekowisata sebagai penyedia layanan wisata dan pelestari SDA sebagai daya tarik utama ekowisata (pemberdayaan). Tujuan pengembangan ekowisata adalah pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat berdaya dalam arti menjadi aktor utama dalam pengelolaan ekowisata dan pelestarian SDA.

Perkembangan Pantai Teluk Kiluan Pekon Kiluan Negri sebagai tujuan ekowisata, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cikal. Pelibatan unsur masyarakat dalam pengembangan ekowisata merupakan potensi bagi pemberdayaan masyarakat secara umum. Mengingat pengembangan ekowisata telah dilakukan sejak Tahun 2007, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pemberdayaan masyarakat yang terjadi seiring dengan pengembangan ekowisata di lokasi.

Ekowisata berbasis masyarakat

Menurut World Conservation Union (1996) ekowisata adalah:

“environmentally responsible, enlightening travel and visitation to relatively undisturbed natural, areas in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features both past and present) that promotes conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially active socioeconomic involvement of local populations (Wood, 2002).”

Definisi ini menekankan ekowisata merupakan perjalanan wisata yang menjaga keseimbangan antara konservasi dan manfaat sosial ekonomi untuk masyarakat lokal.

Konsep ekowisata merupakan konsep wisata yang berlawanan dengan konsep wisata massa dan perhatian pada wisata lokal (Chambell, 1999; Cochrane, 1996 dalam Kontogeorgopoulos, 2005). Penekanan terhadap peran komunitas dalam mengelola ekowisata dikenal dengan sistem *Community Based Ecotourism* (CBE). Menurut Scheyvens (1999) CBE dapat diartikan sebagai suatu bentuk ekowisata di mana masyarakat lokal memiliki kendali penting dan terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan dan proporsi utama keuntungan kepada komunitas. Istilah CBE juga diperkenalkan oleh Belsky (1999), Fitton (1999), Timothy and White (1999).

Mengacu pada United Nations Environment Programme (UNEP), ekowisata harus meliputi komponen-komponen: (1) menyumbang pada konservasi keragaman mahluk hidup, (2) menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal, (3) mendukung tindakan bertanggungjawab pada pariwisata dan industri pariwisata, (4) diluncurkan terutama untuk kelompok kecil dan kelompok usaha skala kecil, (5) konsumsi rendah pada barang yang tidak terbarukan, dan (6) penekanan pada partisipasi lokal, kepemilikan dan peluang usaha terutama untuk masyarakat lokal. Ekowisata menekankan pada partisipasi masyarakat lokal dan manfaat pariwisata untuk masyarakat lokal. Ini juga berarti ekowisata menekankan pada pengelolaan dari, oleh dan untuk masyarakat bukan untuk usaha besar dari luar masyarakat.

Menurut buku pedoman “Prinsip dan Kriteria Ekowisata berbasis masyarakat dari Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Wisata tahun 2009” aspek kunci ekowisata adalah (1) jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (vs *mass tourism*), (2) pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi), (3) pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata), (4) membantu secara langsung perekonomian

masyarakat lokal (nilai ekonomi), (5) modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi), serta (6) ekowisata dan konservasi.

Unsur konservasi masih kuat dan juga meliputi konservasi budaya. Lingkup wisata terbatas sebagai lawan dari konsep mass tourism. Keterbatasan lingkup wisata ini dapat berarti keterbatasan jumlah pengunjung, keterbatasan waktu kunjungan atau keterbatasan akses terhadap sumberdaya sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi di lingkungan ekowisata. Unsur pendidikan kepada pengunjung sebagai bagian dari upaya konservasi alam dan budaya dan lingkup wisata terbatas. Unsur peran masyarakat terbatas pada partisipasi bahkan pada Buku Pedoman Ekowisata masyarakat merupakan bagian dari penerima manfaat.

Hadi (2007) menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah meminimalkan dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif baik kepada turis (*visitors*) maupun penerima (*host*) dan memberikan manfaat dan keberdayaan masyarakat lokal. Unsur keberdayaan masyarakat menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam pengembangan ekowisata.

Mengacu pada konsep-konsep di atas, pelaksanaan ekowisata dapat dikatakan berbasis masyarakat jika pelaksana dan pengambil manfaat utamanya adalah masyarakat *vis a vis* pengelolaan oleh swasta atau pemerintah, menekankan pada kesesuaian dengan daya dukung masyarakat *vis a vis* wisata massa, memberikan unsur pendidikan kepada masyarakat, dan memberikan dampak keberdayaan bagi masyarakat. Konsep masyarakat mengacu pada masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar lokasi pengembangan ekowisata.

Pemberdayaan sosial dalam ekowisata

Pemberdayaan masyarakat menurut Friedmann (1992) meliputi pemberdayaan

ekonomi, pemberdayaan sosial, pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan politik. Keempat jenis pemberdayaan tersebut mengacu pada ranah pemberdayaan yang dilakukan, apakah di ranah politik, ekonomi, psikologis atau sosial.

Scheyvens (1999) mengadopsi pendekatan pemberdayaan Friedmann (1992) ke pemberdayaan di dalam ekowisata. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi mengacu pada pencapaian ekonomi ke komunitas lokal yang ditunjukkan oleh pendapatan tunai atau perbaikan sarana rumah atau masyarakat karena ekowisata. Pemberdayaan psikologi mengacu pada peningkatan kepercayaan diri pada masyarakat karena keunikan dan kelebihan budaya serta sumberdaya alam mereka dihargai oleh pihak luar. Pemberdayaan politik mengacu pada peningkatan posisi tawar setiap pihak dan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terutama untuk kelompok perempuan, anak atau kalangan yang kurang mendapat akses pada pengambilan keputusan sebelum adanya ekowisata. Pemberdayaan sosial mengacu pada peningkatan kohesi sosial dan harmoni di dalam masyarakat dan keluarga karena adanya ekowisata, pendapatan ekonomi dari ekowisata digunakan untuk membangun sarana sosial seperti sekolah atau memperbaiki jalan. Mengacu pada ranah pemberdayaan Friedmann, pemberdayaan ekonomi merupakan ranah pemberdayaan yang paling mendapatkan perhatian dalam pengembangan ekowisata di Indonesia dilihat dari panduan pengembangan ekowisata Indonesia (2009).

Salah satu bentuk pemberdayaan yang sering digunakan dalam melihat dampak sosial ekowisata adalah pemberdayaan sosial. Penelitian dengan fokus pada pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pleno (2006), yang melihat pemberdayaan perempuan di Filipina. Pleno diantaranya melihat peran organisasi masyarakat, LSM dan pemerintah dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Meskipun Pleno tetap melakukan analisis pemberdayaan psikologis dan politik dengan menekankan hasil pemberdayaan

pada peningkatan kepercayaan diri pada perempuan dan pemberdayaan politik dengan meningkatnya posisi tawar perempuan dalam masyarakat dan keluarga, penekanan Pleno masih pada pemberdayaan sosial.

Mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Scheyvens (1999) pemberdayaan sosial karena ekowisata ditandai dengan penguatan kelompok masyarakat termasuk kelompok anak muda dan perempuan, hasil kedatangan wisatawan digunakan untuk pendanaan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan yang biasanya tidak tersentuh oleh program pembangunan seperti perempuan, anak dan penduduk miskin. Hasil pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat dicontohkan oleh Scheyvens (1999) seperti pembangunan sarana air bersih dan hasil-hasil lain yang dapat dinikmati di tingkat lokal.

Pemberdayaan dianggap gagal jika menghasilkan pengalihfungsian tanah adat, kejahatan, pengemis, persepsi kegaduhan, prostitusi dan tidak adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata (Sopeld dan Birtles, 1996; Mansperger, 1993; Rudkin & Hall, 1996, dalam Scheyvens, 1999). Secara singkat, Scheyvens (1999) mengajukan, jika pengelolaan ekowisata dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal, pemberdayaan sosial tidak akan terwujud.

METODE

Penelitian dilakukan di Objek Wisata Teluk Kiluan yang secara administrasi, termasuk dalam wilayah Pekon (desa) Kiluan Negri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus (Bappeda Tanggamus, 2008). Keseluruhan layanan wisata di Teluk Kiluan dilakukan oleh masyarakat Pekon Kiluan Negri, oleh karenanya, lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat di Pekon Kiluan Negri.

Menurut dokumen resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2007), kawasan Pantai Teluk Kiluan termasuk dalam kawasan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Berbasis Ekowisata di Kabupaten Tanggamus. Luas area ekowisata

sekitar 3.232 ha dengan ketentuan wilayah luas daratan 2.066,20 ha dan luas wilayah perairan 1,166 ha. Wilayah perairan ekowisata meliputi seluruh kawasan lamun dan terumbu karang yang ada di Pulau Kiluan serta perairan Teluk Kiluan yang merupakan jalur migrasi mamalia laut atau lumba-lumba. Lokasi penelitian sekaligus memberikan definisi masyarakat lokal, masyarakat Pekon Kiluan Negri termasuk perempuan dan anak.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan penggambaran wilayah ekowisata bersama masyarakat. Responden dan informan dipilih dengan menggunakan teknik snow bowling. Pengumpulan data dilakukan pada bulan pertengahan Mei-Juni Tahun 2015. Pemilihan waktu penelitian didasarkan pada waktu kunjungan wisatawan dan kemudahan akses laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekowisata di Pekon Kiluan Negri

Pengembangan ekowisata di wilayah ini secara khusus diprakarsai oleh LSM Cikal yang bergerak di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2008, LSM Cikal mengajukan kegiatan pengelolaan ekowisata dengan melakukan pendampingan pada masyarakat, pendataan dan pengadaan sarana wisata serta menyediakan jasa pemandu wisata. Kegiatan yang diajukan oleh LSM Cikal seiring dengan penetapan wilayah Pantai Teluk Kiluan dalam rencana pengembangan ekowisata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Terdapat tiga pantai yang menjadi lokasi di Pekon Kiluan Negri, satu laguna dan satu hutan mangrove dan terdapat sembilan cottage, dan beberapa took kelontong. Homestay yang terdata terdapat 5, 10 penyewa perahu, 9 penyewa perlengkapan diving dan snorkeling. Pendapatan dari wisata diperoleh dari biaya tour lumba-lumba Rp. 300.000,-, tiket ke Pantai Kiluan sebesar Rp. 10.000,-, dan tiket masuk ke laguna Rp. 5.000, dan pemandu wisata Rp. 50.000,- untuk 5 pengunjung. Biaya tiket diberikan kepada

pemandu wisata, pemilik perahu, pemilik penyewaan *live jacket* dan kas desa.

Jumlah wisatawan yang berkunjung di Teluk Kiluan sampai saat ini belum ada data pencatatan data statistik karena kelemahan dari setiap pengelola objek tidak mempunyai data atau tidak melakukan pencatatan wisatawan yang datang ke Teluk Kiluan. Menurut Sekretaris Desa menjelaskan bahwa estimasi pengunjung di Teluk Kiluan setiap minggunya berada pada kisaran 75 orang, hal tersebut terjadi pada saat *weekend*, menjelang *long weekend* atau pun liburan sekolah minat kunjungan setiap harinya dapat mencapai 500 orang per hari. Dari data wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa rata-rata wisatawan yang datang ke Teluk Kiluan berasal dari luar Lampung.

Pola perjalanan yang sudah dilakukan wisatawan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan wisatawan menunjukkan bahwa wisatawan yang datang ke Teluk Kiluan umumnya melakukan kegiatan wisata selama 2 *Day 1 Night*, wisatawan sebagian besar adalah kunjungan tipe *group* adapun kunjungan ke Teluk Kiluan biasanya menggunakan agen perjalanan wisata dan dilakukan secara mandiri.

Dari jumlah pengunjung dan pola kunjungan wisata, Teluk Kiluan telah berkembang menjadi *mass tourism* terutama saat *long weekend* atau libur sekolah. Pengelola tidak memiliki mekanisme untuk menyaring dan mengurangi pengunjung. Semakin banyak pengunjung diartikan sebagai semakin berhasil pengembangan wisata di Teluk Kiluan.

Pemberdayaan sosial di wilayah Pekon Kiluan Negri

Pemberdayaan sosial mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Scheyvens (1999) meliputi:

a. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekowisata

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Pekon Kiluan

Nagri terutama ditandai dengan kesertaan LSM Cikal dalam setiap tahap pengembangan ekowisata. Keterlibatan LSM Cikal diakui oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Investasi Promosi dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Tenggamas, Provinsi Lampung. Hampir semua kegiatan pengembangan ekowisata di lokasi melibatkan LSM Cikal sebagai mitra kecuali kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu yang berkerja sama dengan CV Srikandi utama pada Tahun 2007.

LSM Cikal sendiri pada awalnya berpusat di Kota Lampung dan kemudian memfokuskan kegiatan di Pekon Kiluan Negri dengan fokus kegiatan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LSM terdiri dari 10 orang yang berasal dari warga Lampung tiga orang dan warga Pekon Kiluan Negri 7 orang. Saat penelitian dilakukan seluruh anggota LSM tinggal di Pekon Kiluan Negri. Komposisi pengurus dan keanggotaan LSM Cikal menunjukkan pelibatan masyarakat Pekon Kiluan Negri.

Dari sisi pemerintah, pelibatan masyarakat lokal hanya dengan melibatkan LSM Cikal sebagai mitra belum memenuhi unsur partisipasi masyarakat secara umum. Ini ditunjukkan oleh beberapa responden terutama bukan anggota LSM Cikal, bukan pemerintah desa dan bukan tokoh masyarakat atau tokoh nelayan yang merasa tidak pernah dilibatkan bahkan tidak mengetahui program-program apa saja yang pernah pemerintah Kabupaten Tenggamas atau Pemerintah Pusat lakukan di Pekon Kiluan Negri. Perempuan yang tidak terlibat dalam PKK atau tidak memiliki hubungan kedekatan dengan LSM Cikal juga tidak merasa pernah dilibatkan. Mereka memandang aktivitas wisata hanya sebagai kunjungan wisatawan ke Pantai Teluk Kiluan atau orang yang datang untuk melihat lumba-lumba.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan disepakatinya Peraturan Pekon tentang perlindungan sumberdaya laut di wilayah Pekon Kiluan Negri. Pengembangan ekowisata yang berjalan beriringan dengan konservasi wilayah menghasilkan kesepakatan di tingkat Pekon yaitu Peraturan Pekon Kiluan Negri No. 04/07PD/P/0.2.2013 Tentang Larangan Menangkap Ikan/ Satwa Laut dengan Menggunakan Panah, Racun dan Bahan Peledak. Peraturan ini dibuat dalam rapat desa yang difasilitasi oleh LSM Cikal. Menurut informan, pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 30 orang masyarakat 25 laki-laki dan 5 perempuan. Tidak ada anak terlibat dalam pertemuan tersebut. Perempuan terlibat pasif dalam kegiatan dan lebih banyak berperan dalam persiapan acara dan penyedia konsumsi dalam pelaksanaan pertemuan.

Peraturan Pekon dibuat dengan aturan yang mengikat pada seluruh warga Pekon Kiluan Negri. Penetapan sanksi ditetapkan bersama dan penegakan aturan dilakukan oleh aparat desa bekerjasama dengan LSM Cikal. Sampai saat penelitian dilakukan, peraturan dianggap efektif mengurangi penggunaan bahan peledak dan racun oleh masyarakat pekon. Ketakutan akan sanksi yang disepakati bersama menjadi alasan kepatuhan terhadap peraturan pekon tersebut. Kepatuhan terhadap peraturan pekon ini juga mendorong masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi penangkapan lumba-lumba dan ikan hias atau penggunaan peledak oleh nelayan dari luar wilayah Pekon Kiluan Negri. Responden menyampaikan jangan sampai ikan yang mereka jaga ditangkap oleh pihak di luar masyarakat pekon. Menurut Ketua LSM Cikal, peraturan Pekon tersebut dilaksanakan karena dirasa dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan ikan dan lumba-lumba sebagai daya tarik wisata. Dari sisi masyarakat, mereka mau berperan dalam pertemuan karena didorong oleh penurunan hasil tangkapan ikan dan peningkatan pendapatan dari datangnya wisatawan. Ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat terutama laki-laki dalam menegakkan aturan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata tampak dari adanya aturan pengelolaan uang hasil usaha wisata. Aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon Kiluan Negri tersebut disusun dalam rapat desa dan menyepakati besaran tarif sewa perahu, tiket, dan alokasi untuk pekon. Aturan tersebut dinilai mengurangi penghasilan bagi pemilik perahu dan penyewa alat-alat snorkeling namun dinilai baik oleh aparat desa dan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam penyediaan layanan wisata.

Partisipasi masyarakat lokal dalam penyediaan layanan wisata diamati dari siapa penyedia layanan wisata yang ada di wilayah Pekon Kiluan Negri. Berdasarkan pengamatan, jenis layanan wisata yang dilakukan di wilayah Pekon Kiluan Negri adalah pemungutan tiket masuk, penyewaan perahu, jasa pemandu wisata, pedagang makanan, pedagang kelontong, penyewaan alat *diving* dan *snorkeling*, *homestay* dan *cottage*. Penyedia layanan wisata tersebut dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Layanan Wisata Berdasarkan Jumlah dan Pemilik Layanan

No.	Layanan wisata	Jumlah		Pemilik	
		Lokal	Luar	Laki-laki	Perempuan
1	<i>Homestay</i>	5	0	5	0
2	<i>Cottage</i>	7	2	9	0
3	Penyewaan alat <i>snorkeling</i> dan <i>diving</i>	7	2	9	0
4	Pemandu wisata	10	0	10	0
5	Pedagang makanan	2	0	0	2
6	Pedagang kelontong	4	0	2	2
7	Penyewaan perahu	10	0	10	0
8	Penjaga tiket	4	0	4	0

Sumber: diolah dari hasil wawancara, 2015

Berdasarkan komposisi penyedia layanan wisata dapat disimpulkan hingga saat penelitian dilakukan, penyedia layanan wisata sebagian besar masih dilakukan oleh warga Pekon Kiluan Negri. Komposisi pengelola berdasarkan jenis kelamin masih menunjukkan sebagian besar dikelola oleh laki-laki. Ini juga disebabkan karena pemilik

homestay atau *cottage* selalu diartikan sebagai kepala keluarga yang artinya laki-laki meskipun pengelola utamanya perempuan. Pekerjaan di laut seperti menyewakan perahu dan menjadi pemandu wisata masih dianggap sebagai pekerjaan laki-laki dan tidak dapat diakses oleh perempuan.

Pemilik *homestay*, *cottage*, dan penyewaan alat *snorkeling* dan *diving* serta pedagang kelontong besar dilakukan oleh penduduk yang termasuk kategori mampu oleh masyarakat setempat. Layanan wisata yang dapat dilakukan oleh penduduk miskin dan perempuan adalah berdagang makanan, pedagang kelontong dalam skala kecil. Pemandu wisata dilakukan oleh pemuda sedangkan penyewaan perahu oleh nelayan yang memiliki perahu.

Salah satu aktivitas dalam ekowisata adalah pendidikan bagi pengunjung dan masyarakat. Dari sisi pelaksana fungsi pendidikan, LSM Cikal masih berperan sebagai pemberi layanan pendidikan utama bagi masyarakat dan pengunjung. Sarana pendidikan yang dibangun dari program pemerintah (lihat lampiran) untuk fungsi pendidikan lebih banyak digunakan oleh LSM Cikal. Masyarakat lain di luar anggota LSM Cikal menggunakan fasilitas tersebut jika ada pertemuan saja. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada pengunjung hanya dilakukan oleh pemandu wisata dalam bentuk pemberian informasi untuk tidak membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut, dan informasi seperlunya mengenai jenis ikan yang ada di lokasi yang dijadikan lokasi *snorkeling*, peringatan untuk tidak merusak terumbu karang dan tidak membawa karang laut sebagai souvenir.

b. Alokasi hasil pengembangan ekowisata

Sebelum Tahun 2008, pendapatan masyarakat terutama dari kebun dan menangkap ikan. Setelah Tahun 2008, beberapa warga membangun *cottage*, menyewakan perahu, menjadi pemandu

wisata, berjualan makanan di sepanjang pantai, membuka toko kelontong dan penjualan *souvenir*. Secara umum terdapat peningkatan sumber pendapatan masyarakat setelah pengembangan ekowisata. Peningkatan pendapatan per individu atau keluarga diperoleh dari peningkatan hasil penjualan di toko kelontong dan warung makanan, pendapatan dari penyewaan *homestay*, *cottage*, perahu, peralatan *diving* dan *snorkeling* dan jasa pemandu wisata. Pendapatan umum diperoleh dari bantuan pemerintah dan penjualan tiket masuk pantai dan laguna.

Secara individual di tingkat masyarakat, peningkatan kesejahteraan ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan, kemampuan memperbaiki rumah, kemudahan melalui masa paceklik penangkapan ikan, dan kemampuan menyekolahkan anak. Sebagian besar keuntungan diakses oleh masyarakat yang telah berkecukupan sebelum adanya pengembangan wisata yaitu masyarakat yang memiliki modal untuk memperbaiki rumah dan mendapatkan pendapatan dari menyewakan kamar (*homestay*), pemilik perahu, dan pemilik perlengkapan *diving* serta *snorkeling*. Masyarakat yang tidak memiliki modal besar mendapatkan manfaat ekonomi dengan berjualan, bekerja pada pemilik *homestay* untuk menyediakan makanan untuk tamu, bekerja di *cottage* dan menjadi awak kapal. Responden pada kalangan ini menyatakan mendapatkan peningkatan pendapatan setelah tahun 2008.

Pemberdayaan sosial ditandai dengan alokasi hasil pengembangan ekowisata digunakan untuk pendanaan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan yang biasanya tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan seperti perempuan, anak dan penduduk miskin (Scheyvens, 1999). Alokasi pendapatan umum dari bantuan pemerintah dalam bentuk pengadaan dan sosialisasi jika diamati pada lampiran

menunjukkan dari 26 kegiatan hanya dua yang ditujukan secara khusus untuk LSM Cikal dan 24 lainnya untuk masyarakat umum. Ini menunjukkan pengembangan ekowisata memberikan manfaat pada masyarakat Pekon Kiluan Negri. Namun, berdasarkan pendapat responden, tidak seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan pengadaan maupun sosialisasi tersebut. Pada beberapa kegiatan pengadaan seperti pembuatan jalan lingkar desa dan pembangunan dermaga labuh, seluruh responden merasakan manfaat dari hasil pengembangan ekowisata tersebut. Pada kegiatan pengadaan lainnya, seperti penyediaan pondok informasi pariwisata, pembuatan bronjong, pembuatan MCK, pemasangan listrik tenaga surya, dan pondok informasi lumba-lumba hanya sebagian responden yang mengaku menerima manfaat. Manfaat kegiatan pengadaan kurang dirasakan oleh masyarakat yang merasa tidak dekat dengan LSM Cikal, bukan aparat atau tokoh desa, perempuan bukan anggota PKK dan anak-anak. Masalah yang sama dinyatakan responden untuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Pendapatan lainnya yang diperoleh dari pengembangan ekowisata adalah adanya pendapatan uang tunai dari tiket masuk lokasi wisata Pantai Kiluan dan Laguna. Mengacu pada Peraturan Pekon Kiluan Negri, tarif untuk tour lumba-lumba adalah Rp. 300.000,- dengan pembagian pendapatan untuk masyarakat hanya pada biaya yang dialokasikan untuk kas desa. Berikut uraian persentase dana yang diperoleh dari layanan wisata yang diselenggarakan di Pekon Kiluan Negri. Dana pengelola masuk ke pengelola wisata atau agen perjalanan atau ke pemilik *cottage* dan *homestay* jika pengunjung tidak dikelola oleh agen perjalanan wisata.

Tabel 2. Sumber Pendapatan dan Peruntukan Pendapatan

No.	Sumber Pendapatan	Peruntukan (%)	
		Penyedia layanan	Dana Masyarakat
1	<i>Homestay</i>	100	0
2	<i>Cottage</i>	100	0
3	Penyewaan alat <i>snorkeling</i> dan <i>diving</i>	100	0
4	Pemandu wisata	100	0
5	Pedagang makanan	100	0
6	Pedagang kelontong	100	0
7	Penyewaan perahu	80	10
8	Tiket	0	100

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2015

Berdasarkan informasi di atas, dilihat dari alokasi hasil pengembangan ekowisata masih sebagian besar diterima oleh penyedia layanan wisata, masyarakat umum dapat mengakses jika pemerintah desa mengalokasikan pendapatan tersebut untuk penyediaan fasilitas layanan umum (Scheyvens, 1999). Masyarakat dapat mengakses dan menerima manfaat dari penyediaan sarana umum dari pemerintah dan sebagian mendapatkan manfaat dalam bentuk pengetahuan, pengalaman dan pendapatan dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Adanya bagian dari masyarakat yang tidak dapat mengakses manfaat pengembangan ekowisata mengindikasikan masih diperlukannya upaya-upaya untuk pemerataan akses manfaat dari hasil pengembangan ekowisata.

c. Tidak adanya indikasi kegagalan upaya pemberdayaan

Mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Scheyvens (1999), pemberdayaan sosial juga dapat dianggap gagal jika menghasilkan pengalihfungsian tanah adat, kejahatan, pengemis, persepsi kegaduhan, prostitusi dan tidak adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata (Sopeld dan Birtles, 1996; Mansperger, 1993; Rudkin & Hall, 1996, dalam Scheyvens, 1999), atau jika pengelolaan ekowisata dilakukan oleh pihak

swasta atau pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal, pemberdayaan sosial tidak akan terwujud. Penilaian faktor kegagalan dinilai dalam focuss group discussion yang melibatkan 10 perempuan dan 10 laki-laki dengan mengeluarkan unsur LSM dan aparat pekon. Penilaian dilakukan atas kriteria tidak ada (0), ada tetapi tidak signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat (1) serta ada dan signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Tabel 3. Penilaian Masyarakat Terhadap Bentuk Kegagalan Pemberdayaan Sosial

No.	Bentuk Kegagalan	Penilaian Masyarakat	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pengalihfungsian lahan adat	1	1
2	Kejahatan	1	1
3	Pengemis	0	0
4	Persepsi kegaduhan	1	1
5	Prostitusi	0	0
6	Masyarakat tidak berpartisipasi	1	2
7	Pengelola utama adalah swasta	1	1
8	Pengelola utama adalah pemerintah	1	0

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2015

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 menunjukkan faktor kegagalan tidak ada partisipasi masyarakat lebih banyak dirasakan oleh perempuan daripada oleh laki-laki. Dilihat dari skor dua yang hanya ada pada satu indikator, pemberdayaan sosial pada pengembangan ekowisata di Pekon Kiluan Negri telah cukup dalam pemberdayaan sosial dengan penekanan pada peningkatan partisipasi perempuan dan anak.

Jika dilihat dari tujuan ekowisata lainnya, terutama pada unsur konservasi (United Nations Environment Programme (UNEP); Hadi, 2005; Wood, 2002) secara umum, di tingkat masyarakat, pengembangan ekowisata dan penetapan wilayah menjadi wilayah konservasi belum meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dilihat dari kesadaran masyarakat dalam kebersihan pantai, menjaga dan menambah luas wilayah hutan mangrove, dan penangkapan ikan dilindungi dalam skala kecil.

Penangkapan lumba-lumba merupakan hal yang paling efektif berkurang karena pengawasan dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat. Kesadaran untuk menjaga lumba-lumba sebagai daya tarik wisata membuat masyarakat akan menyalahkan penangkapan lumba-lumba dan melaporkan setiap aktivitas penangkapan lumba-lumba. Namun, untuk mangrove, ikan-ikan karang yang diminati pembeli dan sampah, kesadaran masih kurang. Ini dapat dibuktikan dengan pengamatan pada kondisi pantai, hutan mangrove dan masih ditemukannya ikan kerapu jenis dilindungi di pasar.

Dari sisi konservasi budaya (Wood, 2002) perlindungan SDA lebih banyak ditemukan karena sifat wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan sifat hewan yang ada sebagai binatang yang dilindungi. Tidak ditemukan konservasi khas dari Teluk Kiluan atau Pekon Kiluan Negri yang ditentukan sendiri berdasarkan penggalian potensi wilayah di luar peraturan di wilayah konservasi.

Penguatan nilai-nilai lokal sebagai hasil dari ekowisata tidak ditemukan. Konservasi budaya tidak terlalu menonjol ditemukan di Pantai Teluk Kiluan. Masyarakat tidak mengeluhkan perilaku wisatawan kecuali jika ada wisatawan pribumi yang tidak mengenakan pakaian dan hal ini belum pernah ditemui. Tidak ditemukan bentuk adat atau budaya lokal yang dilindungi secara ketat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wisatawan, motivasi kunjungan wisatawan yang datang ke Teluk Kiluan terutama untuk menikmati wisata berupa Lumba-lumba dan Laguna. Perkembangan layanan wisata di Teluk Kiluan menyediakan pilihan bagi wisatawan selain menikmati atraksi lumba-lumba dan laguna yaitu Pantai Pulau Kelapa, Konservasi Mangrove, Pantai Gigi Hiu, *snorkling*, dan *diving*. Tidak ditemukan motivasi pelestarian SDA pada pengunjung perseorangan atau kelompok yang datang untuk tujuan wisata.

Pengunjung juga datang dari kalangan akademisi yang datang untuk melakukan

penelitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN). Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa/mahasiswi dari Universitas di Lampung yang melakukan PKL atau KKN memberikan pengetahuan tentang ekowisata kepada masyarakat terutama pengetahuan tentang kebersihan pantai, pelestarian terumbu karang, mangrove dan ada yang pernah melakukan penelitian pengelolaan usaha di daerah wisata. Kesadaran fungsi ekowisata sebagai fungsi pendidikan, konservasi lingkungan dan konservasi budaya telah dimiliki oleh pengunjung akademisi ini.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan secara umum telah ada partisipasi masyarakat, ada alokasi

hasil pengembangan ekowisata untuk masyarakat dan penilaian positif dari masyarakat untuk unsur kegagalan. Partisipasi masih belum melibatkan perempuan, anak dan unsur masyarakat yang tidak terlibat dalam LSM, bukan aparat desa dan tokoh desa serta bukan penyedia layanan wisata.

Keterbukaan alokasi hasil pengembangan ekowisata juga masih ditanyakan peruntukannya oleh masyarakat pada kelompok ini. Ini menunjukkan masih diperlukannya pelibatan masyarakat secara menyeluruh dan keterbukaan pengelolaan dana hasil pengembangan ekowisata.

DAFTAR ACUAN

- Asso B, IA. Manuaba, I.N. Sunarta. 2010. Kajian Strategis Pengembangan Potensi Ekowisata di Lembah Baliem sebagai Suatu Alternatif Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan, *Ecotrophic. 4 (1) : 31 – 37.*
- Atmoko T. 2010. Strategi Pengembangan Ekowisata pada Habitat Bekantan (*Nasalis Larvatus* Wurmb.) Di Kuala Samboja, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. Vii No. 4 : 425-437, 2010*
- Aziz A. 2008. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Pekalongan, Skripsi Pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Unpub.*
- Belsky J. 1999. Misrepresenting Communities: The Policy Of Community-Based Rural Ecotourism In Gales Point Manatee. Belize, *Rural Sociology* 1999;64 (4): 641–66.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia, 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat.* Jakarta.
- Eprilurahman, R., M.F. Hilmy dan T.F. Qurniawan. 2009. Studi Keanekaragaman Reptil dan Amfibi di Kawasan Ekowisata di Nggoa Sri, Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Berk. Penel. Hoyati: I5 (9-L-97). 2009
- Fitton M. 1996. Does Our Community Want Tourism? Examples From South Wales in M.F. Price (ed.) *People and Tourism in Fragile Environment.* Wiley. Chichester.
- Foucat VSA. 2002. Community-based ecotourism management moving towards sustainability, in Ventanilla Oaxaca, Mexico *Ocean & Coastal Management* 45 (2002) 511–529
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development.* Blackwell. Cambridge.
- Hadi SP. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan.* Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hijriati E, Mardiana, R. 2014. Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan.* Desember 2014, hlm : 146-159
- Imran, A.N. 2012. Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pemanfaatan Potensi Ekowisata bagi Pengembangan Ekowisata di Kawah Cibuni. *Jurnal*

- Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 23 No. 2, Agustus 2012, Hlm. 85 – 102.
- Karsudi RS, H. Kartodihardjo. 2010. Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, JMHT Vol. XVI, (3): 148–154, Desember 2010
- Kontogeorgopoulos N. 2005. Community-Based Ecotourism in Phuket and Ao Phangnga, Thailand: Partial Victories and Bittersweet Remedies. *Journal of Sustainable Tourism*. 13.1 (2005): 4-23.
- Kurnianto IR. 2008. Pengembangan Ekowisata (*Ecotourism*) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal, Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. *Unpub.*
- Muhaerin M. 2008. Kajian Sumberdaya Ekosistem Mangrove untuk Pengelolaan Ekowisata di Estuari Perancak, Jembrana, Bali. Skripsi pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. *Unpub.*
- Pleno MJE. 2006. Ecotourism Project and Women Empowerment : A Case Study in The Province of Bohol, Philippines. *Forum of International Development Studies*, December, 2006.
- Purnomo H, B. Sulistyantara, A. Gunawan. 2013. Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 4 Desember 2013, Hal. 247 – 263
- Scheyvens R. 1999. Case study Ecotourism and The Empowerment of Local Communities., *Tourism Management* 20 (1999) 245-249.
- Tymothy D, White K. 1999. Community Based Ecotourism Development on the Periphery of Balize. *Current Issues in Tourism* 2. 226-42.
- Wood ME. 2002. *Ecotourism : Principle, Practices and Policies for Sustainability*. United Nations Environment Programme (UNEP) Division of Technology Industry and Economics. The International Ecotourism Society. United Nations Publication. USA.